



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022;






Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABD.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	AS	SEKDA	WABUP
				

Pemerintah Daerah; (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi, dsn Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496)
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 284);

KABAG HUKUM	DINASIGADAN KANTOR	ISS	SEMA	WABUP
----------------	-----------------------	-----	------	-------

22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2017-2022.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 adalah Dokumen

KABAG HUKUM	DINASRADAAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
	A			

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- 1) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke-lima dari RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017- 2022.
- 2) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022.
- 3) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Sistematika RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 adalah :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII : Penutup

KABAG HUKUM	DINABIDAN KANTOR	ase	SEDA	WABUP
----------------	---------------------	-----	------	-------

Pasal 5

- 1) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Penyusunan Renja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Renja SKPD sebagai bahan masukan.
- 3) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.





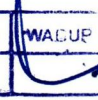
Pasal 7

RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINABIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 7 Juli 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO

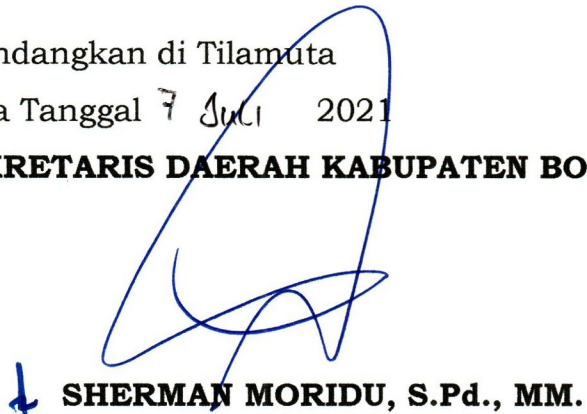


ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



SHERMAN MORIDU, S.Pd., MM.

(BERITA ACARA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR ...35.....)